

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Sebelum dirumuskan permasalahan pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan strategi dan kebijakan.

a. Kekuatan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah daratan seluas 10.595 km² (4%) dan Lautan seluas 241.215 km² (96%), dengan jumlah Penduduk sebanyak 2.137.241 Jiwa, Pulau sebanyak 2.408 buah yang terdiri dari Pulau berpenghuni sejumlah 385 buah, dan sisanya pulau yang tidak berpenghuni. Sebagai provinsi kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar. Selain itu, potensi pulau yang sangat banyak dengan keindahan alam pantai yang menakjubkan menjadi potensi pengembangan wisata. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto, tiga sektor utama penyumbang PDRB yaitu: sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian. Kekuatan lainnya adalah potensi SDM aparatur Pemerintah Provinsi Kepri tergolong potensial, dengan komposisi sebagian besar sarjana serta *keunggulan budaya daerah, nilai adat istiadat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.*

b. Kelemahan

Selain kekuatan, terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, antara lain: jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi (meskipun dilihat persentasenya rendah namun jika dilihat kinerja penurunannya melambat) dan jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Disamping itu, kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan cukup tinggi, khususnya antara Kota Batam dengan Kab/kota yang lain. Kelemahan lainnya adalah lahan dan SDM di bidang pertanian terbatas, sehingga produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

Di bidang infrastruktur, ketersediaan pelabuhan dan dermaga serta kapal pengangkut untuk mendukung konektivitas antar pulau juga sangat kurang. Di sisi yang lain kapasitas listrik yang kurang memadai di beberapa kab/kota, sehingga seringkali terjadi pemadaman bergilir. Ketersediaan air bersih di beberapa kab/kota juga kurang memadai. Begitu pula dengan jaringan telekomunikasi di beberapa pulau berpenghuni juga masih kurang.

c. Peluang

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dalam pengembangan Provinsi Kepulauan Riau antara lain adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan Provinsi Kepri dan pengembangan wilayah terluar/perbatasan semakin meningkat, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Penetapan wilayah Free Trade Zone menjadi peluang bagi peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Disisi yang lain potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan sumberdaya perikanan yang sangat besar menjadi peluang bagi pengembangan industri pengolahan produk perikanan yang berdaya saing tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil.

d. Ancaman

Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau Terdepan di Provinsi Kepri (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jarak tempuh antar kab/kota dan jarak tempuh antar kecamatan yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut untuk mempercepat waktu tempuh. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan persaingan produk dengan negara lain semakin besar, menjadi tantangan dalam peningkatan standarisasi, mutu produk-produk daerah dan menjadi ancaman pula terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

2. Rumusan Permasalahan Pembangunan

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah dan perlu ditingkatkan.
- b. Tenaga guru untuk sekolah di *hinterland* masih kurang memadai, terutama untuk guru eksakta (*natural sciences*).
- c. Sarana dan prasarana belajar mengajar untuk sekolah di pulau *hinterland* seperti Natuna, Anambas dan Lingga.
- d. Angka Melanjutkan ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan ke tingkat pendidikan SMA/SMK/MA belum mencapai 90%, hal ini berarti masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA.
- e. Masih rendahnya kondisi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs dalam kondisi baik. Ruang kelas dalam kondisi baik di pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 48% untuk ruang kelas SD/MI dan 52% untuk ruang kelas SMP/MTs.

- f. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan prima di bidang pendidikan.
- g. Belum kuatnya kelembagaan, prosedur kerja dan sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan sistem perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota.
- i. Belum optimalnya sistem pendataan dan pencatatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota.
- j. Ketersediaan guru dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun masih relatif kurang, demikian juga dari aspek pemerataannya, pada daerah-daerah terpencil masih kekurangan guru sementara di daerah perkotaan cenderung kelebihan guru.
- k. Rendahnya fasilitas teknologi informasi (TI) pada masing-masing satuan pendidikan dan dinas pendidikan yang bisa menghubungkan antar wilayah di wilayah Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi.
- l. Rendahnya jumlah guru bersertifikasi profesi di semua jenjang pendidikan.
- m. Rendahnya persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensinya pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.
- n. Belum optimalnya daya saing siswa dalam berkompetisi untuk tingkat nasional dan internasional
- o. Belum optimalnya prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik dan belum optimalnya pembentukan karakter siswa.
- p. Masih sedikitnya SMK kemaritiman dan politeknik kelautan/perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang mampu menyediakan tenaga terampil di bidang kemaritiman.

2) Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat di daerah *hinterland* (perdesaan dan pulau-pulau) belum optimal.
- b. Tingginya kasus HIV AIDS, ditandai dengan angka prevalensi HIV sebesar 0,33%, dan Persentase ODHA yang mengakses ART (Anti Retroviral Treatment) hanya 51,3% pada tahun 2014.
- c. Tingginya AKI dan AKB, terlihat dari AKI tahun 2014 sebesar 137 per 100.000 kelahiran hidup, dan AKB sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup. Belum seluruh tenaga kesehatan memiliki kapasitas dalam memberikan pertolongan persalinan dan manajemen terpadu balita sakit, serta kondisi geografis menyebabkan sulitnya akses masyarakat menuju tempat pelayanan kesehatan.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif dan promotif pada pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya capaian indikator cakupan rumah tangga yang ber PHBS, cakupan desa/kelurahan siaga aktif, dan cakupan ASI Eksklusif.

- e. Belum optimalnya pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan. Penduduk belum seluruhnya memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu hanya 71% pada tahun 2015.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan baik pada pelayanan primer maupun sekunder, ditandai belum terpenuhinya puskesmas PONEB dan sertifikasi, dan masih rendahnya kesiapan puskesmas menjadi BLUD, dan perlunya peningkatan kualitas RSUD sebagai RSUD BLUD.
- g. Masih kurangnya gizi masyarakat, terbukti dengan masih ditingginya prevalensi gizi kurang pada tahun 2015 sebesar 3,72%, Persentase wasting (kurus dan sangat kurus pada anak balita) sebesar 1,2%, dan kasus BBLR.
- h. Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat, terlihat dari kurangnya cakupan rumah sehat dan cakupan bangunan bebas jentik.
- i. Belum optimalnya penyebarannya tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota, ditandai dengan tingginya kuantitas tenaga kesehatan di Kota Batam berbanding dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- j. Belum optimalnya pelaksanaan imunisasi, dapat dilihat dari cakupan Desa/Kelurahan UCI tahun 2014 hanya 80,9%. Cakupan Desa/Kelurahan UCI terendah di Kabupaten Natuna. Selain itu juga masih ditemukannya PD3I terutama campak. Kondisi ini disebabkan kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data pelaksanaan imunisasi pada pelayanan kesehatan swasta.
- k. Masih ditemukannya kasus DBD, Kusta, Malaria, dan Filariasis. Angka kejadian DBD pada tahun 2015 sebesar 69 per 100.000 penduduk, Angka Kejadian Malaria 0,65 per 100.000 penduduk, dan Angka Kejadian Filariasis sebesar 5 per 100.000 penduduk.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kondisi infrastruktur cukup memadai di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun, tetapi belum merata ke semua daerah.
- b. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak. Tahun 2015 sebesar 28,03% jalan yang masih mengalami kerusakan.
- c. Masih rendahnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian. Tahun 2015 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada baru mencapai 30,64%
- d. Belum optimalnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Tahun 2015 baru mencapai 60,60%
- e. Persoalan ketersediaan dan pasokan air bersih dan belum optimalnya pelayanan sanitasi. Tahun 2015 capaian akses air minum 70,21%, sanitasi 71,80%.
- f. Belum optimalnya pelayanan drainase skala perkotaan, ditandai masih adanya titik-titik banjir.
- g. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kepulauan Riau sehingga belum pula disusun/ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendah ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau masyarakat
- b. Masih tingginya kawasan kumuh di perkotaan.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- b. Masih rendahnya gangguan trantib yang tertangani.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang belum optimal.
- d. Belum tercukupinya personil dalam menunjang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan terhadap korban bencana alam.
- g. Terbatasnya SDM di unit reaksi cepat penanggulangan bencana.
- h. Rendahnya partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

6) Sosial

- a. Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun cakupannya penanganannya masih rendah.
- b. Belum optimalnya pelayanan panti sosial dalam penyediaan jaminan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (Organisasi Sosial/Yayasan/LSM) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

- a. Masih banyaknya pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang belum optimal.
- b. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan berbasis kompetensi, dan rendahnya penempatan pencari kerja yang terdaftar.
- c. Masih terjadinya kasus sengketa perusahaan dan tenaga kerja yang memerlukan penanganan.
- d. Belum optimalnya upaya keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- e. Maraknya demo buruh menolak regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Rendahnya program dan kegiatan responsif gender, belum tersedianya data pilah gender pada semua SKPD, dan belum optimalnya kelembagaan PUG dan Anak.

- b. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga.
- c. Rendahnya jabatan publik yang diemban oleh perempuan, ditandai rendahnya pejabat perempuan eselon II, III, IV, dan rendahnya jumlah anggota DPRD perempuan.
- d. Meningkatnya kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan rendahnya penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak, lansia dan penyandang disabilitas.
- f. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak.
- g. Tingginya kasus trafficking (perdagangan) perempuan dan anak sebagai akibat dari luasnya wilayah posisi provinsi Kepri sebagai daerah tujuan dan transit perdagangan orang.
- h. Rendahnya kontribusi dunia usaha/swasta dalam pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak.
- i. Lemahnya ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis.

3) Pangan

- a. Rendahnya produksi, dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri.
- b. Belum optimalnya pemantauan harga dan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan.
- c. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara merata di kabupaten/kota.
- d. Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam menunjang ketahanan pangan.
- e. Masih rendahnya fasilitas pelayanan distribusi pangan.

4) Pertanahan

- a. Belum optimalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan, terutama masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah provinsi.

5) Lingkungan Hidup

- a. Kualitas lingkungan hidup, terutama di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang perlu mendapat perhatian.
- b. Potensi pencemaran air dan udara semakin tinggi dengan meningkatnya arus masuk dan keluar barang melalui sarana transportasi laut, meningkatnya jumlah industri dan kendaraan bermotor.

- c. Tata ruang dan implementasinya belum ditaati dengan baik, sehingga banyak kawasan lindung yang dikonversi menjadi kawasan pembangunan.
- d. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL dan pemantauan status kualitas lingkungan di area industri.
- e. Belum optimalnya konservasi pada wilayah tangkapan air dan sumber-sumber air.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP, akta kelahiran, dan akta nikah, serta dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya.
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang belum berkembang dan belum optimalnya peran Posyantek dalam penyebarluasan teknologi tepat guna.
- b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, ditandai dengan rendahnya capaian persentase LPM aktif, Posyandu aktif, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan desa.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2,90% pada tahun 2014, dan kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk mengikuti KB.
- b. Tingginya Unmeet need dan drop out KB, serta pelayanan kontrasepsi yang belum optimal.

9) Perhubungan

- a. Terbatasnya jumlah prasarana perhubungan darat, laut dan udara, sehingga keterhubungan (*connectivity*) antar wilayah perlu ditingkatkan.
- b. Terbatasnya armada/ alat transportasi yang menghubungkan antar pulau di Kepulauan Riau maupun dengan daerah lainnya.
- c. Masih rendahnya kapasitas (ketrampilan dan keahlian) aparaturnya perhubungan darat, laut, maupun udara.
- d. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana pengamanan lalu lintas.

10) Komunikasi & informatika

- a. Upaya penerapan e-gov belum optimal, rintisan baru pada sosialisasi mengenai e-gov yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Belum optimalnya SKPD dalam pengelolaan/update data dan informasi pada website.
- c. Penyebaran informasi hasil pembangunan daerah melalui berbagai media massa belum optimal.

11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- a. Masih rendahnya kemampuan SDM perkoperasian dalam pengembangan koperasi di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Masih terbatasnya omset pemasaran produk UMKM.
- c. Meningkatnya persaingan produk UMKM seiring dengan pasar bebas ASEAN melalui MEA pada tahun 2015.

12) Penanaman modal

- a. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi.
- b. Belum meratanya investasi di berbagai kabupaten/kota, masih terpusat di Kota Batam dan Tanjungpinang.
- c. Belum optimalnya pengelolaan data investasi dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

13) Kepemudaan dan olah raga

- a. Masih rendahnya prestasi pemuda di tingkat nasional dan internasional.
- b. Masih rendahnya minat dan kemampuan pemuda untuk berwirausaha.
- c. Rendahnya prestasi berbagai cabang olahraga di tingkat nasional.
- d. Terbatasnya kualitas SDM pelatih dalam menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan.
- e. Rendahnya budaya olahraga pada masyarakat.
- d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan berstandar nasional.

14) Statistik

- a. Belum optimalnya penyediaan data statistik yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, khususnya statistik sektoral.

15) Persandian

- a. Belum optimalnya kemampuan SDM SANTEL dalam menjaga keamanan informasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak bertanggung jawab.

16) Kebudayaan

- a. Pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya belum optimal.
- b. Belum optimalnya promosi tentang kebudayaan melayu.
- c. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala nasional dan internasional.
- d. Arus Globalisasi menyebabkan masyarakat *ter-infiltrasi* dengan budaya asing yang materialistis, dan hedonis sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

17) Perpustakaan

- a. Terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Belum optimalnya minat baca masyarakat, ditandai jumlah pengunjung perpustakaan provinsi yang masih kurang.

18) Kearsipan

- a. Masih kurangnya jumlah arsip/dokumen yang diduplikat dalam bentuk informatika.
- b. Masih kurangnya tenaga/SDM pengelola kearsipan yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan arsip/dokumen.
- c. Belum tersedianya gedung arsip daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan perikanan tangkap, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna, Bintan dan Lingga.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti: Pelabuhan Perikanan, *cold storage* dan pabrik es serta masih terbatasnya BBM subsidi khusus untuk operasional nelayan.
- c. Struktur armada kapal perikanan masih didominasi armada dan alat tangkap tradisional.
- d. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, dan terbatasnya sarana budidaya perikanan, seperti: benih ikan dan pakan ikan.
- e. Industri hilir perikanan belum berkembang, dan masih jumlah produk olahan hasil perikanan serta ekspor hasil perikanan yang masih rendah.
- f. *IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)* masih terjadi.

2) Pariwisata

- a. Masih kurangnya penyelenggaraan even-even wisata bahari untuk menarik wisatawan berkunjung di Kepulauan Riau
- b. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana wisata bahari untuk menunjang daya tarik wisata di Kepulauan Riau.

- c. Masih rendahnya kapasitas SDM pariwisata bahari berkaitan dengan manajemen pengelolaan obyek wisata, dan kerjasama dengan pelaku usaha pendukung wisata.
- d. Masih minimnya sarana perhubungan untuk menunjang aksesibilitas ke daerah obyek wisata.
- e. Masih kurangnya promosi pariwisata baik di tingkat nasional dan internasional.

3) Pertanian

- a. Sektor pertanian belum berkembang, kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayur mayur didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor, disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas, daya dukung sumberdaya air yang kurang, minat petani yang semakin menurun, dan penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), kondisi tanah kurang subur, dan jumlah penyuluh pertanian yang semakin berkurang.
- b. Populasi hewan ternak yang semakin berkurang dan tingginya prevalensi penyakit hewan dan penyakit zoonosis pada hewan ternak, dan kuantitas SDM dokter hewan yang masih kurang.

4) Kehutanan

- a. Masih adanya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang harus segera ditangani.
- b. Masih adanya usaha industri kayu yang belum memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

5) Energi dan sumber daya mineral

- a. Masih rendahnya pemenuhan daya listrik, dan masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik.
- b. Rendahnya kesadaran perusahaan energi dan sumberdaya mineral pada kegiatan pasca tambang dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Masih adanya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- d. Jumlah pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang masih rendah.

6) Perdagangan

- a. Menurunnya nilai bersih ekspor dan terbatasnya jenis produk asal Kepulauan Riau yang dapat diterima pasar internasional.
- b. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar yang dapat berakibat pada tidak terlindunginya konsumen.
- c. Masih banyak pedagang kaki lima yang belum tertata sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum.

7) Perindustrian

- a. Menurunnya pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar.
- b. Akses ke pasar dan sumber-sumber permodalan, skill dan manajerial industri masih kurang.
- c. Industri yang berkembang umumnya industri yang bersifat "footloose" sehingga rentan terhadap gejolak perubahan ekonomi global.
- d. Masih rendahnya cakupan kelompok pengrajin yang dibina dan terbatasnya akses pelaku IKM dalam mengikuti pameran produk.

8) Transmigrasi

- a. Kurangnya ketersediaan lahan areal transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga penempatan transmigran kurang.

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

- a. Belum optimalnya kualitas, dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Meningkatnya amanat peraturan perundang-undangan untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor.
- c. Belum terimplementasikannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan, dan inovasi IPTEK di bidang industri, UKM, perdagangan, dan jasa.

2) Keuangan

- a. Belum optimalnya intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Terbatasnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) untuk membiayai pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acual.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

- a. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal.
- b. Tingginya angka pelanggaran disiplin oleh aparatur.

4) Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

5) Sekretariat Daerah

- a. Peraturan perundangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru.
- b. Belum semua unit-unit pelayanan SKPD memiliki standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik (SPP) dan melaksanakannya secara konsisten.

- c. Belum optimalnya capaian kinerja dan penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD.
- d. Belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
- e. Kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi reformasi birokrasi yang masih rendah.

6) Inspektorat Daerah

- a. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kebijakan kepala daerah
- b. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam pencegahan dan penanganan kasus hasil pengawasan serta pengaduan masyarakat.

7) Kantor Penghubung

- a. Belum optimalnya penyebarluasan potensi dan peluang investasi, pariwisata, dan seni dan budaya daerah kepada dunia usaha dan masyarakat di Provinsi lainnya.
- b. Belum optimalnya tampilan pengelolaan website kantor penghubung
- c. Belum optimalnya pengelolaan asrama mahasiswa kepri yang ada di luar provinsi kepri.
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan tampilan display anjungan kepri di Taman Mini Indonesia Indah.

8) Badan Pengelola Perbatasan

- a. Belum optimalnya perencanaan dan koordinasi pengembangan wilayah perbatasan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan dengan mendasarkan pada hasil identifikasi isu strategis berdasarkan tantangan dan kebijakan RPJMN tahun 2015-2019, RTRW Provinsi Kepulauan Riau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Hasil Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Identifikasi Isu Strategis				Rumusan Isu Strategis RPJMD
RPJMN		RTRW	KLHS	
Tantangan	Kebijakan Pokok	Prioritas Pemanfaatan Ruang	Isu Strategis	
1. Stabilitas Politik dan Keamanan 2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien 3. Pemberantasan Korupsi	5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.	-	10. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	10. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan yang belum optimal
4. Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.			
5. Percepatan Pemerataan dan Keadilan	3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah	1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya. 4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.	2. Keterbatasan ketersediaan dan menurunnya kualitas air baku 6. Ketersediaan dan Pemenuhan Kebutuhan energi belum optimal 7. Minimnya sarana prasarana penunjang perekonomian wilayah perdesaaan dan perkotaan	1. Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan 2. Pengangguran Cukup Tinggi 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah 7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai 12. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota 8. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi 13 Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi 9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal

Identifikasi Isu Strategis				Rumusan Isu Strategis RPJMD
RPJMN		RTRW	KLHS	
6. Keberlanjutan Pembangunan	4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.	2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.	1. Tingginya ancaman bencana alam dan non alam 3. Penurunan Kualitas udara yang diakibatkan industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran hutan 4. Degradasi hutan, lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan. 5. Meningkatnya volume limbah domestik dan B3 serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan	15. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-teraan Rakyat Yang Berkeadilan.		8. Masih minimnya akses terhadap sarana prasarana kesehatan masyarakat	3. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal 5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah 6. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal 14. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu
5. Percepatan Pembangunan Kelautan	2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan	3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut.	9. Masih rendahnya pendapatan masyarakat pesisir	11. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata

Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan meliputi:

1. Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau meskipun cenderung menurun dari tahun 2010 sebesar 8,13% (137.072 jiwa) menjadi 6,24% (122.398 Jiwa) pada tahun 2015, namun lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Bangka Belitung (4,97%).

2. Pengangguran Cukup Tinggi

Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, yaitu sebesar 6,20% pada tahun 2015. Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat.

3. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal

IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat. Angka IPM pada tahun 2014 sebesar 73,40 perlu terus ditingkatkan agar kualitas SDM semakin baik, sehingga Angka Usia Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah, dan Tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi.

4. Kesenjangan dan Keadilan Gender Masih Rendah

IPG Provinsi Kepri pada tahun 2014 baru mencapai 93,20, dan IDG tahun 2013 sebesar 60,79. IPG Provinsi Kepri masih lebih rendah dibandingkan kondisi ideal yaitu menuju angka 100. Dilihat capaian masing-masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah

Pemerataan dan kualitas pendidikan masih belum optimal, terkendala pada kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota yang dipisahkan oleh laut. APK SMA/SMK/MA relatif rendah, baru mencapai 89,37% pada tahun 2015. Pemerataan guru pada wilayah terpencil belum merata.

6. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal

Derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Angka Usia Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 69,97 tahun, AKI sebesar 137 per 100.000 KH, AKB sebesar 16 per 1.000 KH, AKBa sebesar 25 per 1000 KH dan Gizi Buruk sebesar 0,53%. Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular juga tinggi.

7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 71,97%, Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 10,20%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 73,57%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 71,35%. Disamping itu,

terdapat pula permasalahan keterbatasan ketersediaan dan menurunnya kualitas air baku.

8. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi

Kesenjangan pembangunan antar daerah masih tergolong tinggi, terutama antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain. Ketimpangan pedapatan antar kelompok penduduk menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,36 pada tahun 2013.

9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal

Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terluar (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih dalam proses penetapan di PBB. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal.

10. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal

Kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah relatif kecil, pada tahun 2015 total penerimaan (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah) hanya sebesar 2.637 milyar rupiah.

11. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata

Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut seluas 96% dengan potensi maritim dan wisata yang besar, namun saat ini belum dikembangkan.

12. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota

Transportasi udara (penerbangan komersial) belum menjangkau seluruh Kabupaten. Transportasi antar pulau belum memadai dari aspek sarpras (pelabuhan dan dermaga dan kapal angkutan umum). Hal ini ditandai dengan jumlah pelabuhan internasional 11 unit, Jumlah pelabuhan barang internasional 6 unit, Pelabuhan Perintis 5 unit, Pelabuhan Samudera 3 unit.

13. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi

Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota tahun 2015, dari sebanyak 43 kecamatan, tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2, ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98 %), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26 %), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 %), dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84 %). Kecamatan-kecamatan di Prioritas 3 dan 4 merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang, sedangkan prioritas 5 dan 6 termasuk kategori tahan pangan.

14. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu

Pelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu perlu ditingkatkan. Persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2015 baru mencapai sebesar 14,97%. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, sehingga ke depan perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Jumlah Event Kebudayaan Tingkat regional, nasional dan International pada tahun 2015 hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali.

15. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana

Masalah lingkungan yang paling rentan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah pembuangan limbah industri, tumpahan minyak dari aktivitas transportasi, pengeboran minyak lepas pantai, dan pengilangan minyak, serta penambangan pasir. Rata-rata jumlah limbah slop oil dan sludge oil yang terdampar dan mencemari pantai bagian utara Pulau Bintan setiap tahunnya mencapai 50 ton. Selain itu, terdapat pula permasalahan berupa penurunan kualitas udara yang diakibatkan industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran hutan; degradasi hutan, lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan; dan meningkatnya volume limbah domestik dan B3 serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan, serta tingginya ancaman bencana alam dan non alam.